

**PERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENERAPAN HUKUM ADAT SASI  
BAGI NEGERI LIMA KECAMATAN LEIHITU  
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Muhammad Idul Launuru  
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon  
Email; idullaunuru88@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan melihat penerapan Hukum Adat Sasi bagi Negeri Lima maka sanksi-sanksi atas pelanggaran adat sasi dilaksanakan oleh penguasa negeri, pemilik sasi dan panitia sasi. Pelaksanaan sasi di Negeri Lima juga tidak terlepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang dikenal dengan hukum sasi. Hukum adat Sasi adalah ketentuan hukum tentang larangan memasuki, mengambil atau melakukan sesuatu dalam suatu kawasan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Sasi bagi masyarakat Negeri Lima adalah sersifat larangan yang melindungi sesuatu atau hasil tertentu dalam batas waktu tertentu, diberlakukan dengan tanda tertentu yang mempunyai sifat atau kekuatan hukum yang berlaku untuk umum maupun untuk perorangan. Sanksi diberikan dengan tujuan tidak hanya sekedar memberikan trauma atau perasaan jera bagi pelanggar, namun untuk mendidik sang pelanggar untuk tidak melakukan hal yang sama.

Kata kunci; Pemberdayaan, Hukum Adat, Sasi

**ABSTRACT**

This study aims to analyze and see the application of Sasi Customary Law for the State Five, the sanctions for violations of adat sasi are carried out by the state authorities, sasi owner and sasi committee. The implementation of sasi in Negeri Lima is also inseparable from the applicable rules, both written and unwritten, known as sasi law. Sasi customary law is a legal provision regarding the prohibition of entering, take or do something in a certain area and within a period of time certain too. Sasi for the people of Negeri Lima is in the nature of a protective prohibition something or a certain result within a certain time limit, enforced with a certain sign which has the nature or force of law that applies to the public as well as to individual. Sanctions are given with the aim of not only providing trauma or feelings of contempt for the offender, but to educate the offender not to do the same.

Keywords; Empowerment, Customary Law, Sasi

**Pendahuluan**

Maluku merupakan salah satu daerah yang memiliki hak-hak adat atau masyarakat hukum adat dalam sistem pengelolaan hutan, maka dalam pengelolaan hutan di Maluku di kenal dengan sistem pengelolaan hutan sasi. Pengelolaan hutan dengan sistem sasi memiliki ke unikan dan berbeda-beda berdasarkan hukum adat yang terdapat di daerah-daerah yang ada di Maluku. Upaya pelestarian lingkungan hidup bagi masyarakat Maluku sudah dilaksanakan sejak dulu. Hal ini akan dibuktikan dengan salah satu budaya masyarakat Maluku yang melarang pengambilan hasil-hasil potensi tertentu dengan atau tanpa merusak lingkungan. Kegiatan pengambilan hasil-hasil potensi ini oleh masyarakat Maluku dikenal dengan sebutan “Sasi.” Sasi merupakan suatu tradisi masyarakat negeri di Maluku, untuk menjaga hasil-hasil potensi tertentu. Sasi di laksanakan, maka masyarakat dilarang untuk memetik buah-buah tertentu di darat dan mengambil hasil tertentu dari laut selama jangka waktu yang di tetapkan oleh pemerintah desa.<sup>1</sup>

Khusus di Negeri Lima pelaksanaan hukum sasi tersebut menyangkut pengaturan hubungan manusia dengan alam, dan manusia dengan manusia lain dalam wilayah yang dikenakan larangan untuk mengambil, memanfaatkan, dan memindahkan sesuatu berkenaan tradisi sasi. Selain itu, tradisi sasi merupakan suatu upaya untuk memelihara tata krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya ke arah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumber daya alam sekitar kepada seluruh masyarakat setempat. sasi juga dikenal sebagai cara pengolahan sumber daya alam.<sup>2</sup>

Sasi di Negeri Lima dapat diartikan sebagai larangan untuk mengambil hasil sumberdaya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumberdaya hayati (hewani maupun nabati) alam tersebut. Karena peraturan-peraturan dalam pelaksanaan larangan ini juga menyangkut pengaturan hubungan manusia dengan alam dan antar manusia dalam wilayah yang dikenakan larangan tersebut, maka sasi, pada hakikatnya, juga merupakan suatu upaya untuk memelihara tata-krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya ke arah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumberdaya alam sekitar kepada seluruh warga/penduduk setempat. Saat ini, sasi memang lebih cenderung bersifat hukum adat bukan tradisi, dimana sasi digunakan sebagai cara mengambil kebijakan dalam pengambilan hasil pertanian.

---

<sup>1</sup>Frank L Cooley, *Mimbar dan Tahta*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), h. 189.

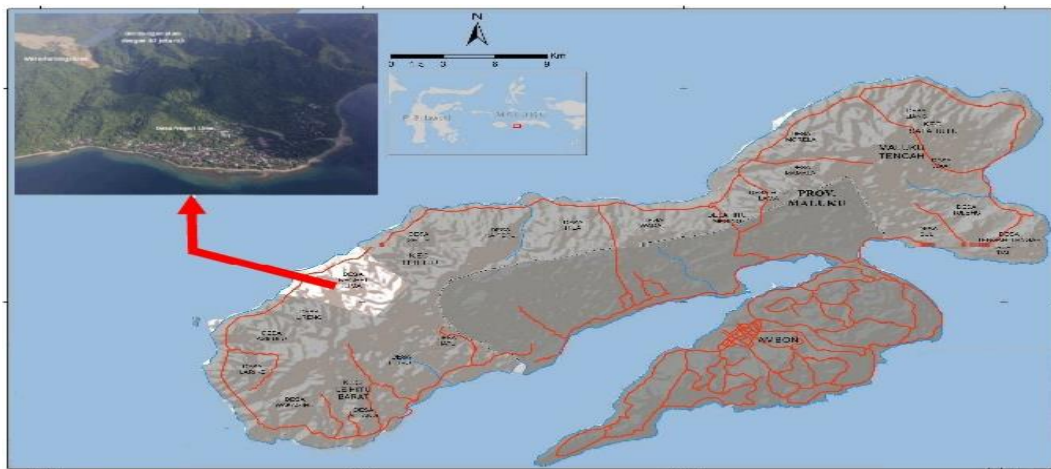
<sup>2</sup> Suntuco, *Kajian Struktur, Fungsi, Dan Nilai Budaya Tradisi Sasi (Ritual Penetapan Larangan Berdasarkan Adat) Suku Moi Pesisir Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat*, (Skripsi; Universitas Pendidikan Indonesia, 2016, h. ii.

Hukum sasi yang diterapkan di Negeri Lima terbagi atas dua macam, yaitu hukum sasi adat dan hukum sasi denda. Yang di maksud dengan hukum sasi adat adalah perbuatan yang dapat di pidana, sedangkan hukum sasi denda adalah sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara kewang mempergunakannya, dalam hal ini kewenangannya untuk menerapkan pidana.<sup>3</sup>

Beberapa negeri di Maluku, masih melestarikan budaya sasi. Salah satu negeri yang masih melakukan sasi terhadap tanaman-tanaman, baik tanaman umur pendek maupun tanaman umur panjang ialah Negeri Lima, yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.

### **Gambaran Umum Desa Negeri Lima**

Secara geografis Negeri Lima terletak di pesisir utara pulau Ambon termasuk dalam wilayah Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Jarak Negri Lima ke Ibukota Kecamatan di Hila kurang lebih 18 km melalui jalur darat, sedangkan jarak ke ibukota Propinsi dikota Ambon kurang lebih 50 km. Negeri Lima merupakan negeri induk untuk dua dusun bawahan atau petuanannya, yaitu dusun waikiku dan dusun waimuli dengan luas wilayah keseluruhan 50 km<sup>2</sup>.



### **Gambar Desa Negeri Lima**

Kecamatan Leihitu yang meliputi beberapa desa yaitu: Asilulu, Hila, Hitulama (Hitu Lama), Hitumessing (Hitu Mesing), Kaitetu, Mamala, Morella, Negeri Lima, Seith, Ureng, dan Wakal.

Negeri Lima terletak di Pulau Ambon, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di sebelah barat laut Pulau Ambon memiliki luas wilayah  $\pm 11.700$  Ha<sup>2</sup>.

<sup>3</sup> JE.Lokollo 'Het Recht van sasi in De Moluken, 1988:18, h. 293.

Negeri Lima merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Leihitu, provinsi maluku. Letak Negeri Lima termasuk paling barat diantara desa-desa maupun kelurahan lain yang termasuk di dalam wilayah Kecamatan Leihitu Jarak negeri batu merah ke Kecamatan adalah 18,7 km yang dapat ditempuh menggunakan kendaraan bermotor sekitar  $\pm$  34 menit. Sedangkan jarak Desa Kampung Baru ke ibu kota provinsi adalah 43,1 Km dan dapat ditempuh selama  $\pm$  1 jam 28 Menit dengan menggunakan kendaraan bermotor. Batas-batas Negeri Lima:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan garis pantai
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Negeri Hatu
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Negeri Ureng
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Negeri Seith.

### **Pelaksanaan Sasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Pelaksanaan Sasi difokuskan dalam peningkatan perekonomian masyarakat dan juga dapat digunakan untuk perbaikan pelayanan umum seperti perbaikan masjid dari hasil sasi tersebut, hal ini sesuai dengan yang di jelaskan oleh Don Assel, tua-tua adat yakni strategi pemberdayaan yang di lakukan melalui pengelolaan sasi selain untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat yaitu pengelolaan uang hasil sasi untuk kepentingan umum seperti perbaikan masjid, perbaikan tembok, mengecat.<sup>4</sup>

Hal itu ditunjukkan oleh adanya sasi seperti dalam pengelolaan hasil pertanian seperti pala maupun kelapa yang bertujuan mendapat hasil yang maksimal selain itu juga dapat mempengaruhi dalam kondisi masyarakatnya yang berprofesi petani yang pendapatannya sekali memanen hasil seperti pala sekitar 20.000 s/d 30.000 biji buah pala dan lebih dari 1000 buah kelapa sekali panen sangat membantu perekonomian masyarakat Negeri lima. Seperti yang di katakan oleh ketua adat, yaitu H. Sapu Suneth, yakni; Hasil panen dalam pelaksanaan sasi dalam sekali memanen hasil seperti pala sekitar 20.000 biji buah pala dan lebih dari 300 buah kelapa sekali panen yang jika di total akan sangat membantu perekonomian masyarakat.<sup>5</sup> sesuai dengan yang dijelaskan oleh Panitia Sasi, Surahman Pesihatu yakni; sekali pelaksanaan sasi akan mendapatkan hasil seperti pala sekitar 20.000 biji atau kira-kira 8 karung ukuran 50 kg bahkan lebih dan lebih dari 300 buah kelapa sekali pelaksanaan sasi.<sup>6</sup>

Hal itu menunjukkan bahwa dampak pelaksanaan sasi bagi masyarakat negeri lima sangat mempengaruhi tingkat ekonomi masyarakat karena dalam sekali memanen

---

<sup>4</sup> Don Assel, Tokoh Adat, wawancara 09 januari 2021 , di Negeri lima

<sup>5</sup> Hj Sapu Suneth, Ketua At, wawancara 09 januari 2021 , di Negeri lima

<sup>6</sup> Surahman Pesihatu, Panitia Sasi, wawancara 09 januari 2021 , di Negeri lima

hasil sasi pala maupun kelapa pemilik sasi/pemilik kebun akan mendapat hasil yang sangat banyak ketika dijual nantinya, dengan adanya sasi ini masyarakat terberdayakan.

Selain itu ada beberapa factor yang dapat mempengaruhi pemberdayaan terhadap masyarakat yakni faktor alam, kurangnya penampung hasil sasi, dan kurangnya kesadaran dari masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan yang dijelaskan oleh ketua sasi, Roni Soulisa yakni pelaksanaan sasi terdapat beberapa faktor yaitu factor alam yang sangat mengganggu apalagi akan mempengaruhi kualitas hasil sasi tersebut yaitu hama, yang kedua adalah kurangnya penampung hasil sasi seperti belum adanya tempat yang di jadikan pengumpulan hasil sasi seperti pala maupun kelapa, dan kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang pelaksanaan sasi tersebut.<sup>7</sup>

Oleh karena itu pengelolaan dengan baik akan menghasilkan kualitas yang baik pula dan semestinya masalah yang terjadi bisa diantisipasi sedini mungkin agar hasil yang didapatkan tidak terlalu di pengaruhi oleh factor di atas.

### **Sasi di Negeri Lima**

Sasi merupakan kearifan lokal masyarakat yang telah ada sejak dahulu kala dan merupakan komitmen bersama baik oleh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama. Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa tanpa lingkungan masyarakat tidak dapat hidup dengan layak, sehingga sasi harus dipertahankan oleh generasi ke generasi. Suatu upaya untuk memelihara tata krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya ke arah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumberdaya alam sekitar kepada seluruh warga atau penduduk setempat. Sasi adalah suatu bentuk larangan pengambilan sumber daya alam baik di darat maupun di laut dalam kurun waktu tertentu sehingga memungkinkan sumberdaya alam dapat tumbuh, berkembang dan dilestarikan. Ini artinya, masyarakat memang telah menyadari bahwa alam adalah bagian yang tidak dapat dilepaspisahkan dengan kehidupan mereka. Keberadaan sasi tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat dan membantu masyarakat agar dapat memanfaatkan semua potensi yang ada pada alam ini dengan sebijaksana mungkin, agar hasil-hasil alam yang melimpah tidak saja di manfaatkan oleh masyarakat yang hidup pada saat ini, tetapi juga bagi generasi di masa yang akan datang.<sup>8</sup>

Jelasnya sasi muncul karena adanya keresahan masyarakat tentang hasil yang didapatkan masyarakat karena adanya pencurian hasil seperti pala dan kelapa yang mengakibatkan jumlah yang didapatkan pada saat panen berkurang, oleh karena itu sasi

---

<sup>7</sup>Roni Soulisa, Ketua Sasi, wawancara 11 januari 2021 , di Negeri lima

<sup>8</sup>Anonimous, dinamika sasi Gereja di Negeri Administratif Hatuhenu sasi <https://repository.uksw.edu>. diakses pada 02/04/2021/19:35.WIT

sebagai solusi untuk mencegah pencurian karena akan dihukum secara adat ketika melanggarnya dan juga dapat mendapat hasil yang banyak ketika memanennya, kegiatan sasi ini mulai berkembang di Maluku khususnya di desa Negeri Lima pada 1970-an yang mulai berkembang sampai sekarang dan tidak merubah aturan-aturan yang dipakai pada jaman dulu. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh H. Sapu Suneth, ketua adat yaitu sejarah sasi di Negeri Lima dimulai pada tahun 1970-an. Sasi ini dibentuk karena adanya pencurian hasil seperti pala dan kelapa yang mengakibatkan jumlah yang didapatkan pada saat panen berkurang oleh karena itu sasi berkembang sampai saat ini untuk menjadi solusi bagi masyarakat dapat meningkatkan perekonomian.<sup>9</sup>

Pelaksanaan sasi di Negeri Lima juga tidak terlepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang dikenal dengan hukum sasi. Bahkan ada beberapa yang tidak mengetahui sasi dan cara melanggarnya seperti di bawah ini terdapat sejauh mana masyarakat mengetahui sasi. Tenggang waktu pelaksanaan sasi biasanya itu 1 tahun sampai 2 tahun sesuai dengan kesepakatan pemilik sasi dan penitia sasi selain itu dilihat juga luas wilayah yang akan dilakukan sasi tersebut sehingga dapat diketahui berapa lama waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan sasi, hal ini dijelaskan oleh oleh panitia sasi, Surahman Pesihatu bahwa pelaksanaan sasi dilakukan selama 1 sampai 2 tahun sesuai kesepakatan pemilik sasi dan penitia sasi selain itu juga dilihat luas wilayah yang ingin dilakukannya sasi baru bisa ditentukan berapa lama pelaksanaan sasi tersebut.<sup>10</sup>

Sesuai dengan yang dijelaskan oleh masyarakat, Rafik Soulisa, kaur pemerintahan negeri, yakni: pelaksanaan sasi biasanya dilakukan 1 sampai 2 tahun sesuai dengan kesepakatan dan juga mempertimbangkan luas wilayah yang ingin dilakukan sasi tersebut dan juga kalau menyangkut jumlah yang nanti akan didapatkan sudah pasti lebih banyak 2 tahun masa sasi dari pada 1 tahun masa sasi dilakukan dan juga akan mempengaruhi harganya.<sup>11</sup>

Ini artinya bahwa lama pelaksanaan sasi itu 1 sampai 2 tahun tergantung kesepakatan pemilik sasi dan penitia sasi selain itu dilihat juga luas wilayah yang akan dilakukan sasi tersebut sehingga dapat diketahui berapa lama waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan sasi. Pelaksanaan sasi biasanya dilakukan oleh beberapa orang yang masuk dalam panitian pelaksana yaitu sekitar 15 orang atau lebih tergantung permintaan pasar akan hasil sasi tersebut, hal ini dijelaskan oleh oleh Panitia Sasi, Surahman Pesihatu yakni: didalam setiap pelaksanaan sasi beberapa orang untuk membantu pelaksanaan sasi

---

<sup>9</sup> H. Sapu Suneth, Ketua Adat, wawancara 09 januari 2021 , di Negeri lima

<sup>10</sup> Surahman Pesihatu, Panitia Sasi, wawancara 09 januari 2021 , di Negeri lima

<sup>11</sup> Rafik Soulisa, Kaur Pemerintahan Negeri Lima, wawancara 09 januari 2021 , di Negeri lima

yaitu 15 orang orang atau lebih tergantung permintaan pasar akan hasil sasi tersebut.<sup>12</sup> Hal yang sama juga sesuai dengan yang dijelaskan oleh masyarakat, Fuat Assel yakni: bianya lebih dari 10 orang atau lebih anggota sasi tergantung permintaan dan kesepakatan pemilik sasi dan panitia sasi.<sup>13</sup>

Informan lain menyebutkan bahwa sasi adalah suatu bentuk larangan pengambilan sumber daya alam baik di darat maupun di laut dalam kurun waktu tertentu sehingga memungkinkan sumberdaya alam dapat tumbuh, berkembang dan dilestarikan. Ini artinya, masyarakat memang telah menyadari bahwa alam adalah bagian yang tidak dapat dilepaspisahkan dengan kehidupan mereka. Pelaksanaan sasi di Negeri Lima juga tidak terlepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang dikenal dengan Hukum sasi adalah suatu sistem hukum lokal yang berisikan larangan dan keharusan untuk mengambil potensi sumber daya alam untuk jangka waktu tertentu, beberapa jenis sasi yang di lakukan pada masyarakat Negeri Lima yaitu; Sasi Pala dan Sasi Kelapa.

Sesuai dengan yang dijelaskan oleh ketua adat oleh H. Sapu Suneth, ketua adat yaitu sasi yang dilakukan di sini (Negeri Lima) terdapat 2 sasi yaitu sasi pala dan kelapa, keduanya sama-sama mempunyai aturan adat dalam pelaksanaan sasi tapi sedikit beda cara pembagian dan pemberian cuka.<sup>14</sup> Hal ini juga sesuai dengan yang dijelaskan oleh masyarakat, Abdurahman Soulissa yakni: Yaaa yang katong tau sasi di sini itu ada 2 yaitu sasi pala dan Kalapa yang sama-sama mempunyai aturan kalau yang dilanggar akan mendapat sanksi sesuai dengan adat atau aturan berlak.<sup>15</sup> Tujuan utama dilakukannya sasi adalah untuk menjaga keseimbangan antara alam, manusia, dan dunia spiritual, dan 2 pelanggaran atas pelaksanaan sasi akan memperoleh hukuman serta sanksi berdasarkan dunia spiritual dan sanksi masyarakat.

### **Hukuman terhadap Pelanggar Hukum Sasi Bagi Masyarakat Negeri Lima**

Sama halnya dengan adat yang lain, maka sanksi-sanksi atas pelanggaran adat sasi dilaksanakan oleh penguasa negeri, pemilik sasi dan panitia sasi. Oleh karena itu orang sangat takut melanggar sasi. Bilamana ada orang yang melanggar sasi yaitu melakukan pengambilan hasil perkebunan seperti pala dan kelapa pada masa tutup sasi maka hukuman yang diberikan oleh pemerintah negeri yaitu raja dan perangkat negeri

---

<sup>12</sup> Surahman Pesihatu, Panitia Sasi Negeri Lima, wawancara 09 januari 2021 , di Negeri lima

<sup>13</sup> Fuad Assel, Masyarakat Negeri Lima, wawancara 11 januari 2021 , di Negeri lima

<sup>14</sup> H. Sapu Suneth, Ketua adat Negeri Lima, wawancara 09 januari 2021 , di Negeri lima

<sup>15</sup> Abdurahman Soulissa, Masyarakat Negeri Lima, wawancara 11 januari 2021 , di Negeri lima

kepada si pelanggar adalah ditangkap, dipertontonkan dihadapan masyarakat umum dan mendapat hukuman fisik lainnya seperti cambuk, dan dikenakan denda.<sup>16</sup>

Hukum adat Sasi adalah ketentuan hukum tentang larangan memasuki, mengambil atau melakukan sesuatu dalam suatu kawasan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Bentuk sasi adalah berupa pucuk daun kelapa yang berwarna kuning atau janur kuning yang dianyam terbalik dan ditancap atau ditanam pada sesuatu yang dianggap sebagai hak miliknya sebagai tanda larangan. Sasi merupakan salah satu bentuk dari menjaga hubungan antara manusia dan alam atau lingkungan disekitar masyarakat adat Negeri Lima. Sasi merupakan adat khusus yang berlaku hampir di seluruh pulau di Maluku, meliputi Halmahera, Ternate, Buru, Seram, Ambon, Kep. Lease, Watubela, Banda, Kai, Aru dan Kep. Barat Daya dan Kep. Tenggara di bagian Barat Daya Maluku. Khusus di wilayah Negeri Lima dalam masyarakat adat dapat dirumuskan sebagai yaitu; larangan yang bersifat melindungi sesuatu atau hasil tertentu dalam batas waktu tertentu, diberlakukan dengan tanda tertentu yang mempunyai sifat atau kekuatan hukum yang berlaku untuk umum maupun untuk perorangan.

Sasi merupakan larangan temporer untuk mengambil hasil sumberdaya alam tertentu, pada wilayah tertentu, sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumberdaya hayati (hewani maupun nabati) alam tersebut. hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Hal ini juga sesuai dengan yang dijelaskan oleh H. Sapu Suneth, Sebagai ketua adat, yakni: sasi adalah tradisi di sini (Negeri Lima) yang berupa larangan pengambilan hasil alam yaitu berupa kelapa dan pala yang tujuannya untuk menekan hasil alam tersebut sehingga dapat dipanen lebih banyak karena adanya pencurian yang biasanya terjadi sehingga akan mempengaruhi kualitas dan juga jumlah hasil yang didapatkan nantinya.<sup>17</sup> Seperti hal ini juga sesuai dengan yang dijelaskan oleh Fuad Assel, anggota masyarakat Negeri Lima, bahwa sasi ini sangat bagus apalagi harga di pasaran pala semakin mahal dan juga harga kelapa semakin mahal pula otomatis kualitas akan mempengaruhi tingkat hasil yang didapatkan nantinya otomatis perlu adanya penjagaan yang sangat ketat oleh karena itu sangat penting adanya sasi karena adanya aturan dan hukuman ketika melanggarnya.”<sup>18</sup>

Sasi memiliki aturan-aturan dan tata cara pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan sehingga keseimbangan lingkungan terjaga dan sumber daya alam yang ada di dalamnya dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya.

---

<sup>16</sup> Zulfikar Judge, Marissa Nurizka, “Peranan Hukum Adat Sasi Laut Dalam Melindungi Kelestarian Lingkungan Di Desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat,” (Skripsi; Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta, 2008), h.41

<sup>17</sup> H. Sapu Suneth, Ketua adat Negeri Lima, wawancara 09 januari 2021 , di Negeri lima

<sup>18</sup> Fuad Assel, Anggota masyarakat Negeri Lima, wawancara 11 januari 2021 , di Negeri lima



## Hukuman Atau Sanksi Denda Uang

Sasi merupakan bentuk aturan atau larangan yang bersifat sementara dan mulai ditetapkan pada saat sasi telah ditutup. Saat sasi telah ditutup, masyarakat hanya boleh melintas di area yang di sasi, tidak diperbolehkan mengambil hasil dari wilayah yang sedang di sasi. Aturan sasi berakhir ketika telah diumumkan bahwa sudah saatnya buka sasi. Walaupun sudah dibuat peraturan yang ditujukan untuk melindungi wilayah sasi, masih ada masyarakat desa ataupun masyarakat dari luar desa yang melanggar aturan yang telah dibuat. Jenis pelanggaran dengan kategori ringan dapat mengambil beberapa biji pala atau kelapa di wilayah sasi. Jenis pelanggaran yang dikategorikan berat contohnya adalah mengambil sebagian hasil sasi sebelum tenggang waktu pengambilan.<sup>19</sup>

Salah satu bentuk sanksi ringan yang bukan termasuk denda adalah dengan cara mengambil atau menyita alat-alat yang digunakan untuk mengambil benda yang disasikan dan benda-benda yang diambil dari tempat sasi. Sanksi ringan lainnya dapat berupa denda uang dan denda fisik. Denda uang yang diterapkan di masing-masing daerah berbeda. Denda uang yang dikenakan berbeda di masing-masing daerah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat. Contohnya adalah desa Negeri Lima. Denda uang yang dikenakan adalah membayar pala dana kelapa dengan nominal yang sudah ditetapkan.

Denda uang yang dikenakan juga dapat sejumlah dengan harga biota atau sumber daya apapun yang diambil dari tempat sasi, lalu diuangkan kembali dan diberikan kepada lembaga adat atau panitia sasi. Bagi masyarakat desa Negeri Lima, denda uang yang ditetapkan bagi pelanggar mengambil sumber daya yang disasi sebelum waktu yang ditentukan, maka diberikan sanksi berupa bayar denda Rp 10.000 per biji yang diambil misalkan 1 biji pala atau kelapa sama-sama di denda Rp 10.000, hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Surahman Pesihatu, Sebagai Panitia Sasi yaitu; sanksi yang diberikan kepada pelanggar sasi yaitu per biji yang diambil misalkan 1 biji pala atau kelapa sama-sama di denda Rp 10.000, pernah ada yang mendapat sanksi sekitar Rp 660.000 karena mengambil kelapa pada saat masi dalam sasi begitu juga pernah ditemukan juga pelanggar yang mengambil pala dalam pelaksana sasi.<sup>20</sup> Sama halnya seperti yang dijelaskan oleh responden oleh H. Sapu Suneth, Sebagai ketua adat, yakni; sanksi terhadap pelanggar sasi itu selain hukuman fisik ada juga hukuman diberikan denda bagi

---

<sup>19</sup> Lestari E, Satria A. "Peranan sistem sasi dalam menunjang pengelolaan berkelanjutan pada kawasan konservasi perairan daerah Raja Ampat," *Buletin Ilmiah "MARINA" Sosek Kelautan dan Perikanan*, Vol. 1, No. 2, 2015, h. 67-76.

<sup>20</sup> Surahman Pesihatu, Sebagai Panitia Sasi, wawancara 09 januari 2021 , di Negeri lima

mereka yang melanggar sasi yaitu perbiji yang diambil misalkan 1 biji pala atau kelapa sama-sama di denda Rp 10.000

Hal itu menunjukkan bahwa pelanggar sasi diwajibkan membayar sesuai ketentuan yang sudah ada sesuai aturan adat sasi yaitu perbiji yang diambil misalkan 1 biji pala atau kelapa sama-sama di denda Rp 10.000, selain sanksi ini berlaku kesiapa saja baik di luar seperti turis maupun pejabat negeri, seperti yang ditertera di tabel dibawah ini tentang apakah ketika denda yang diberikan sengaja dilebihkan. Seperti apa yang disampaikan oleh sala satu responden Surahman Pesihatu, Sebagai Panitia Sasi yaitu; siapa saja mendapat sanksi meskipun orang luar atau turis maupun pejabat negeri semua harus menjalankan sanksi baik sanksi fisik maupun sanksi denda uang, semestinya setiap orang harus mengetahui seluk beluk tentang suatu tempat terlebih dahulu sebelum melakukan pelanggaran, kalau sudah mengetahuinya pasti tidak akan terjadi hal yang bisa merusak tradisi/budaya di tempat itu.”<sup>21</sup>

Informan lain juga disampaikan oleh Rafik Soulisa, Kaur Pemerintahan Negeri Lima, bahwa siapa saja wajib baik pejabat negeri maupun orng luar jika dia melanggar sasi maka akan disanksi sesuai berat dan kondisi sasi yang diambil. Kami juga bekerja sama dengan beberapa pihak termasuk desa dan juga kepolisian jika ada pelanggaran yang melebihi ketentuan akan dilaporkan sebagai tindak pencurian.<sup>22</sup>

Ketika terjadi pelanggaran sasi pelakunya diberikan sanksi baik fisik maupun denda sesuai dengan ketentuan pelaksanaan sanksi yaitu 1 biji pala itu sama dengan Rp 10.000, begitu pula 1 buah kelapa didenda yang sama seperti pala, sanksi ini bersifat umum artinya semua orang baik di luar desa maupun didalam desa, baik pejabat negeri maupun orang pendatang wajib membawa denda ketika melakukan pelanggaran sasi.

### **Hukuman Cambuk Bagi Pelanggar Sasi**

Sanksi diberikan dengan tujuan tidak hanya sekedar memberikan trauma atau perasaan jeru bagi pelanggar, namun untuk mendidik sang pelanggar untuk tidak melakukan hal yang sama. Sanksi yang dikenakan berupa sanksi adat yaitu. Sanksi adat dapat berupa sanksi fisik atau biasanya berupa hukuman cambuk biasanya menggunakan alat seperti kabel yang berukuran 1 meter. Tujuannya untuk efek jera bagi

---

<sup>21</sup> Surahman Pesihatu, Sebagai Panitia Sasi, wawancara 09 januari 2021 , di Negeri lima

<sup>22</sup> Rafik Soulisa, kaur pemerintahan negeri, wawancara 09 januari 2021 , di Negeri lima

masyarakat.<sup>23</sup> Sanksi ini terbagi menjadi dua, yaitu sanksi ringan dan sanksi berat. Sanksi ringan dapat berupa dilakukannya hukuman cambuk dan sanksi di ikat dan di taburi dengan sisa kelapa parut sehingga semit menghampiri dan menggiti dan biasanya hukuman ini diberikan di halaman masjid. Sanksi sendiri diberikan sebagai bentuk dari penyelesaian atau tindak lanjut dari aturan-aturan yang telah dibuat, ini sesuai dengan pernyataan oleh dijelaskan oleh Panitia Sasi, Surahman Pesihatu yakni; sanksi bagi pelanggar sasi yaitu sanksi fisik berupa dicambuk dengan kabel yang berukuran 1 meter ini dilakukan untuk efek jera bagi pelanggar sasi tersebut.<sup>24</sup>

Sama halnya juga sesuai dengan dijelaskan oleh Rafik Soulisa, kasi pemerintahan negeri, yakni: sanksi ini sudah berlaku dari dulu bahkan kami juga berkerjasama dengan pihak desa dan kepolisian dalam hal pemberian hukuman baik yang ringan maupun yang berat jadi tidak ada kekerasan dalam pemberlakuan hukum sasi di sini.<sup>25</sup> Ini juga sesuai dengan yang dijelaskan oleh yakni Ketua adat, H. Sapu Suneth, yaitu: aturan itu sudah ada bertahun-tahun sampai sekarang masih dipakai yaitu “sanksi bagi pelanggar sasi yaitu sanksi fisik berupa dicambuk dengan kabel yang berukuran 1 meter ini dilakukan untuk efek jera bagi pelanggar sasi tersebut.”<sup>26</sup>

Sanksi bagi pelanggar sasi yaitu sanksi fisik berupa dicambuk dengan kabel, ini dilakukan untuk efek jera bagi pelanggar sasi tersebut kalau tidak jera juga ada sanksi yang sedikit berat yaitu sanksi mengikat pelanggar sasi dan ditaburi kelapa parut sehingga semut datang dan menggigit pelanggar, hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Surahman Pesihatu, Sebagai Panitia Sasi yaitu; kalau pelanggar melakukan pelanggaran sasi lagi maka akan dihukum lebih berat yaitu sanksi mengikat pelanggar sasi dan ditaburi kelapa parut sehingga semut datang dan menggigit pelanggar.<sup>27</sup> Hasil wawancara juga dengan masyarakat Fuat Assel, yakni; ya... sanksi yang fisik selain dicambuk juga ada sanksi mengikat pelanggar sasi dan ditaburi kelapa parut sehingga semut datang dan menggigit pelanggar dan saya juga pernah melihat juga.<sup>28</sup> Ini menggambarkan bahwa yang pelanggar sasi akan di hukum baik sanksi fisik berupa cambuk dan sanksi mengikat pelanggar sasi dan ditaburi kelapa parut agar pelanggar mendapatkan efek jera sehingga tidak diulangi kembali.

## **Kesimpulan**

---

<sup>23</sup> Anonimous, Sasi sebagai budaya konservasi sumberdaya alam di Maluku <https://www.researchgate.net/> diakses pada 20/05/2021/13:32 WIT

<sup>24</sup> Surahman Pesihatu, Panitia Sasi Negeri Lima, wawancara 09 januari 2021, di Negeri lima

<sup>25</sup> Rafik Soulisa, Kasi Pemerintahan Negeri Lima, wawancara 09 januari 2021, di Negeri lima

<sup>26</sup> H. Sapu Suneth, Ketua Adat Negeri Lima, wawancara 09 januari 2021, di Negeri lima

<sup>27</sup> Surahman Pesihatu, Panitia Sasi Negeri Lima, wawancara 09 januari 2021, di Negeri lima

<sup>28</sup> Fuad Assel, Sebagai masyarakat, wawancara 11 januari 2021, di Negeri lima

1. Dampak pelaksanaan sasi bagi masyarakat Negeri Lima sangat mempengaruhi tingkat ekonomi masyarakat karena dalam sekali memanen hasil sasi pala maupun kelapa pemilik sasi/pemilik kebun akan mendapat hasil yang sangat banyak ketika dijual nantinya, dengan adanya sasi ini masyarakat terberdayakan. Pelaksanaan sasi terdapat beberapa factor yaitu factor alam yang sangat mengganggu apalagi akan mempengaruhi kualitas hasil sasi tersebut yaitu hama, yang kedua adalah kurangnya penampung hasil sasi seperti belum adanya tempat yang di jadikan pengumpulan hasil sasi seperti pala maupun kelapa, dan kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang pelaksanaan sasi tersebut
2. Penerapan hukum Adat Sasi diterapkan di desa Negeri Lima bahwa sanksi bagi pelanggar sasi yaitu sanksi fisik berupa dicambuk, ini dilakukan untuk efek jera bagi pelanggar sasi tersebut kalau tidak di jera juga ada sanksi yang sedikit berat yaitu sanksi mengikat pelanggar sasi dan ditaburi kelapa parut sehingga semut datang dan mengigit pelanggar, panitia Sasi merapkan hukuman bagi semua masyarakat yang melanggar aturan Sasi yang disepati bersama pemerinta desa Negeri Lima. Ini menggambarkan bahwa yang pelanggar sasi akan di hukum baik sanksi fisik berupa cambuk dan sanksi mengikat pelanggar sasi dan ditaburi kelapa parut agar pelanggar mendapatkan efek jera sehingga tidak diulangi kembali.

### **DaFTAR PUSTAKA**

- Anonimous, Sasi sebagai budaya konservasi sumberdaya alam di Maluku  
<https://www.researchgate.net/> diakses pada 20/05/2021/13:32 WIT
- , dinamika sasi Gereja di Negeri Administratif Hatuhenu sasi  
<https://repository.uksw.edu>. diakses pada 02/04/2021/19:35.WIT
- Cooley, Frank L. *Mimbar dan Tahta*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.

Judge, Zulfikar Marissa Nurizka. Peranan Hukum Adat Sasi Laut Dalam Melindungi Kelestarian Lingkungan Di Desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, Skripsi; Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta, 2008

Lestari E, Satria A. “Peranan sistem sasi dalam menunjang pengelolaan berkelanjutan pada kawasan konservasi perairan daerah Raja Ampat,” *Buletin Ilmiah “MARINA” Sosek Kelautan dan Perikanan*, Vol. 1, No. 2, 2015.

Lokollo, JE. *Het Recht van sasi in De Moluken*, 1988: 18.

Suntoko. “Kajian Struktur, Fungsi, Dan Nilai Budaya Tradisi Sasi (Ritual Penetapan Larangan Berdasarkan Adat) Suku Moi Pesisir Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat,” Skripsi; Universitas Pendidikan Indonesia, 2016

### **Wawancara**

Fuad Assel, Sebagai Masyarakat

Abdurahman Soulissa, Masyarakat

H. Sapu Suneth, Sebagai Ketua Adat

Rafik Soulisa, Kasi Pemerintahan Negeri

Surahman Pesihatu, Sebagai Panitia Sasi